

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP JUMLAH
PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016-2017**

Usep Siswadi* Firmansyah Tian Septiantini*****

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info

Abstract

Keywords:

*Poor Population Number,
Village Fund Allocation*

Poverty always attracts the attention of various groups, both academics and practitioners. Various theories, concepts and approaches are constantly being developed to uncover the curtain of the "mystery" of poverty. Indonesia, the problem of poverty is a social problem that is always relevant to be studied continuously. This is not only because the problem of poverty has been around for a long time and is still present in our midst now, but also because now the symptoms are increasing in line with the multidimensional crisis that is still faced by the Indonesian people.

Management of village fund allocations must fulfill several management principles, each activity whose funding is taken from village fund allocations must go through open planning, implementation and evaluation on principle. Allocation of village funds must be used with the principle of frugality, direction and control, all activities and use of village fund allocations can be accounted for administratively, technically and legally. The types of activities that will be funded through village fund allocation are expected to be able to improve community service facilities, in the form of fulfilling the basis, strengthening village institutionalization and other activities needed by the village community through decision-making through deliberation.

In order to increase empowerment, prosperity and equitable development in rural areas through district, provincial and central government budget funds, the district government. Provinces and centers need to realize in the APBD 10% each for village allocation funds. By allocating 10% of the funds, it is hoped that welfare and equitable development in the village can become a reality. The creation of equal distribution of development, especially in rural areas through the provincial government budget funds and the central government of 10%, will achieve a level of welfare and standard of living for people living in rural areas.

The design of testing this hypothesis is assessed by the income of the null hypothesis and alternative hypotheses, the research of statistical tests and the calculation of the value of statistical tests, the calculation of hypotheses, the determination of a significant level and drawing conclusions.

Corresponding Author:

usepsiswadi67@gmail.com

firmansound92@gmail.com

tianseptiantini@gmail.com

Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai “misteri” kemiskinan ini. DiIndonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan, setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali, seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten. Propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui dana APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan pendapatan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak dapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

©2021 JSAB. All rights reserved.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai “misteri” kemiskinan ini. DiIndonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial

yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Menurut Edi Suharto (2014: 134) kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang.

Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali, seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai mekanisme yang berlaku. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan desa adalah ADD. Berdasarkan pasal 1 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengalokasian keuangan desa menyebutkan bahwa “ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”

Penyusunan anggaran pada laporan keuangan dana Desa masih belum tepat waktu, sehingga penerapan anggaran belum dikatakan berjalan dengan baik oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan masih belum dapat ditindaklanjuti serta pelaporan anggaran yang tidak dapat direalisasikan dengan baik mengakibatkan dana yang dikeluarkan lebih besar sehingga berdampak negatif pada pembangunan.

Berbagai sumber memberikan standarisasi dalam penentuan standar minimum untuk mengklasifikasikan besarnya ukuran standar minimum kemiskinan. Standar minimum kemiskinan menurut badan pusat statistik (BPS) Indonesia yakni ukuran standar kemiskinan yang didasarkan atas seberapa besar seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat standar minimum.

Pada negara berkembang masalah jumlah penduduk miskin sangat sulit untuk diatasi. Jumlah penduduk miskin bahkan setiap tahunnya cenderung bertambah jika tidak ada solusi yang tepat dari pemerintah Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi contohnya seperti kurangnya ketersediaan sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara tidak layak. Seperti, kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang terjadi pada negara berkembang faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam mempengaruhi angka kemiskinan yang ada. Di kabupaten lebak sebagai wilayah dengan penduduk terdapat diindonesia tentunya sangat sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan. Banyaknya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, upah yang rendah dan masih di bawah standar.

Penduduk Miskin

Menurut Edi Suharto (2014: 134) mengatakan bahwa “Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan. Seperti kekurangan pendidikan, kekurangan keadaan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Menurut Bambang Rustanto (2015: 1) mengatakan bahwa “Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan timbulnya permasalahan sosial yang lain”.

Kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 3:2002). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makan, pakaian, rumah, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Faktor-Faktor Penghambat Kemiskinan

faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari diri sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan oleh Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat berkerja.

Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan

Sejak kelahirannya sekian abad lalu, pekerjaan sosial (*social work*) telah terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Perkembangan pekerjaan sosial berikutnya, khususnya dari kegiatan karitatif menjadi sebuah profesi, juga tidak dapat dilepaskan dari penanganan kemiskinan. Penerapan *the Eliza-beth poor law* di Inggris

sebagai strategi menghadapi kemiskinan akibat *the Great Depression* tahun 1930-an tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah perkembangan profesi pekerjaan sosial.

Strategi Penanganan Kemiskinan

Strategi penanganan kemiskinan pekerjaan terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Namun, karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “*person-in-environment* dan *person-in-situation*”.

Alokasi Dana Desa

Pengertian alokasi dana desa

Pengertian alokasi dana desa menurut beberapa ahli adalah :

Menurut Yusran Lapananda (2016: 26) mengatakan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut HAW.Widjaja (2014: 133) mengatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat, merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan”.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan : a. alokasi dasar dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kelemahan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kelemahan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistic. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengenai desain deskriptif yaitu

menjelaskan permasalahan pengaruh alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten lebak.

Populasi dan Sampel

Juliansyah Noor, (2011: 147) “ Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian.

Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di kabupaten lebak berjumlah 28 kecamatan di kabupaten lebak.

Juliansyah Noor, (2011 : 148) “ pengambilan sampel (sampling) proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

Observasi (melakukan penelitian ke lapangan), merupakan upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan itu berlangsung, dengan atau tanpa alat bantu. Artinya data yang diperoleh melalui observasi berasal dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku.

Dokumentasi Mengumpulkan data yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang berasal dari arsip-arsip yang dimiliki oleh perusahaan yang dianggap mampu memberikan data yang signifikasi dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono 2010:204).

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji normalitas, regresi linear sederhana, analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji t sebagaimana dengan menggunakan program SPSS versi 20.0.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Alokasi Dana Desa di Kab. Lebak tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Tahun	
		2016	2017
1	Malingping	4,887,506,000	5,248,250,000
2	Panggarangan	3,722,372,000	3,997,179,000
3	Bayah	3,681,253,000	3,953,046,000
4	Cipanas	4,686,629,000	5,032,647,000
5	Muncang	4,121,899,000	4,426,169,000
6	Leuwidamar	4,202,946,000	4,513,156,000
7	Bojongmanik	2,998,925,000	3,220,346,000
8	Gunungkencana	4,063,328,000	4,363,302,000
9	Banjarsari	6,744,340,000	7,242,253,000

10	Cileles	4,160,428,000	4,467,522,000
11	Cimarga	5,918,746,000	6,335,615,000
12	Sajira	5,134,248,000	5,513,285,000
13	Maja	4,828,986,000	5,185,442,000
14	Rangkasbitung	3,765,578,000	4,056,846,000
15	Warunggunung	4,116,430,000	4,423,972,000
16	Cijaku	3,393,077,000	3,737,501,300
17	Cikukur	4,529,280,000	4,869,599,000
18	Cibadak	5,054,356,000	5,421,081,000
19	Cibeber	7,314,091,000	7,754,125,000
20	Cilograng	3,348,521,000	3,604,747,000
21	Wanasalam	4,619,137,000	4,960,034,000
22	Sobang	3,354,526,000	3,602,189,000
23	Curugbitung	3,387,108,000	3,637,161,000
24	Kalanganyar	2,430,444,000	2,610,340,000
25	Lebakgedong	2,035,537,000	2,185,809,000
26	Cihara	3,038,032,000	3,262,321,000
27	Cirinten	3,336,595,000	3,582,944,000
28	Cigemblong	3,034,283,000	3,258,296,000

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa alokasi dana desa tertinggi pada kecamatan cibeber dengan julah alokasi dana desa 7,754,125,000 pada tahun 2017, sedangkan alokasi dana desa terendah pada kecamatan lebak gedong dengan jumlah alokasi dana desa 2,035,537,000 dengan jumlah tersebut alokasi dana desa pada kabupaten lebak berada pada titik terendahnya.

Alokasi dana desa selama tahun 2016-2017 pada kabupaten lebak adalah sebesar 240,373,778,900.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel
Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1087.121	702.195		1.548	.127
1 ALOKASI DANA DESA	8.206E-007	.000	.578	5.211	.000

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen, dan memperkirakan nilai variabel terkait berdasarkan nilai variabel bebas persamaan yang dipergunakan untuk memprediksi nilai variabel Y disebut dengan persamaan regresi.

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada output SPSS pada tabel Coefficients diketahui nilai t sebesar 5,211 dengan nilai Sig. sebesar 0,000 (artinya nilai Sig tersebut $< 0,05$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan alokasi dana desa terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten lebak.

Uji t

Tabel
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1087.121	702.195		1.548	.127
1 ALOKASI DANA DESA	8.206E-007	.000	.578	5.211	.000

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

Berdasarkan hasil olahan diatas, maka diperoleh penjelasan bahwa variabel jumlah penduduk miskin mendapat statistic uji t sebesar 5,211 dengan signifikan 0,000. Koefisien hasil uji t dari jumlah penduduk miskin menunjukkan tingkat signifikan 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Pembahasan

Jumlah Penduduk Miskin

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada kecamatan banjarsari dengan jumlah 8.326 pada tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah yaitu pada kecamatan cijaku dengan jumlah 1.355 pada tahun 2016 dan 2017.

Sedang jumlah penduduk miskin di kabupaten labak tahun 2016 – 2017 yaitu 257.954 jiwa. dan untuk Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin kabupaten lebak Periode 2016-2017 Yaitu sebesar 4.606 jiwa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa tertinggi pada kecamatan cibeber dengan jumlah alokasi dana desa 7,754,125,000 pada tahun 2017, sedangkan alokasi dana desa terendah pada kecamatan lebak gedong dengan jumlah alokasi dana desa 2,035,537,000 dengan jumlah tersebut alokasi dana desa pada kabupaten lebak berada pada titik terendahnya.

Alokasi dana desa selama tahun 2016 – 2017 pada kabupaten lebak adalah sebesar 240,373,778,900.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Untuk uji *kolmogorov-Smirnov* jika signifikan $> 0,05$ maka data distribusi normal dan jika signifikan $< 0,05$ maka tidak berdistribusi normal. Dari tabel diatas diperoleh nilai Sig 0,250 $> 0,05$ sehingga data berdistribusi normal, yang berarti data berasal dari populasi berdistribusi normal.

Persamaan regresi sederhana $Y = a + bX = 2.410 + 4.077X$. Dari persamaan ini dapat dijelaskan bahwa constanta (a) sebesar 2.410 dan koefisien regresi sebesar 4. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan satu kali jumlah penduduk miskin diprediksi akan meningkatkan alokasi dana desa.

Pengujian hubungan atau disebut koefisien korelasi. Dalam penelitian ini yang mana hubungan jumlah penduduk miskin dengan alokasi dana desa menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,578 serta koefisien determinasinya sebesar 0,335 atau 33,5% yang mana dari 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan didapat hasil persamaan regresi linier sederhana yaitu alokasi dana desa $1087.121 + 8.206E.007$ (alokasi dana desa). Persamaan regresi ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan terhadap variabel dependen, dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, apabila jumlah penduduk miskin bertambah 1, maka alokasi dana desa akan bertambah 8.206E.007.

Kemudian dilakukan analisis koefisien korelasi yang dihasilkan alokasi dana desa (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) adalah sebesar 0,578. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,578 berada diangka Sedang antara 0,40 – 0,599 yang menunjukkan korelasi yang sedang, serta angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang mengartikan bahwa hubungan variabel searah. Pengaruh positif memiliki arti jika jumlah penduduk miskin meningkat maka alokasi dana desa juga meningkat.

Sedangkan perhitungan koefisien determinasi menghasilkan angka sebesar 0,335 atau 33,5%. Angka ini memberikan arti bahwa alokasi dana desa dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin sebesar 33,5% sedangkan sisanya 66,5% lainnya oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah penduduk miskin terhadap alokasi dana desa di kabupaten lebak maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Alokasi dana desa di kabupaten lebak tertinggi pada kecamatan cibeber dengan jumlah alokasi dana desa 7,754,125,000 pada tahun 2017, sedangkan alokasi dana desa terendah pada kecamatan lebak gedong dengan jumlah alokasi dana desa 2,035,537,000 dengan jumlah tersebut alokasi dana desa pada kabupaten lebak berada pada titik terendahnya.

Bahwa jumlah penduduk miskin kabupaten lebak tahun 2016 – 2017, jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu pada kecamatan banjarsari dengan jumlah 8.326 pada tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah yaitu pada kecamatan cijaku dengan jumlah 1.355 pada tahun 2016 dan 2017.

Pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap alokasi dana desa di kabupaten lebak. Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana, alokasi dana desa sehingga dapat dikatakan angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang mengartikan bahwa hubungan variabel searah.

Daftar Pustaka

Edi Suharto. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama: 2014.

Lapananda Yusran. *Hukum pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Rmbooks. 2016.

Rustanto Bambang. *Menangani kemiskinan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya: 2015.

Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama. *Jurnal pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di propinsi sumatera utara*. Volume 4 No 2 november 2018. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Widjaja Haw. *Otonomi desa*. Jakarta. Rajawali: 2014.